

**ANALISIS INTERVENSI POLITIK  
TERHADAP REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG  
DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

**TESIS**

**OLEH:  
ATIKA VERINA  
NO BP. 1720862021**

**DOSEN PEMBIMBING:  
1. PROF. DR. RER, SOZ. NURSYIRWAN EFENDI  
2. DR. AIDINIL SETRA, M.A**



**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
TAHUN 2019**

**ANALISIS INTERVENSI POLITIK  
TERHADAP REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG  
DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**

**OLEH:**

**ATIKA VERINA  
NO BP. 1720862021**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. RER, SOZ. NURSYIRWAN EFENDI**
- 2. DR. AIDINIL SETRA, M.A**



**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
TAHUN 2019**

## ABSTRAK

Nama : Atika Verina  
ProgramStudi : Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas  
Judul : Analisis Intervensi Politik Terhadap Rekrutmen Pegawai Negeri  
Sipil Daerah Yang Dipekerjakan Pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum  
Kota Padang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen, mandiri dan harus bebas dari intervensi pihak manapun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal kepegawaian dan pengisian jabatan structural tertentu, Komisi Pemilihan Umum masih sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah, yang memiliki dampak terstruktur dari intervensi politik terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam pengambilan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses terjadinya intervensi dan menjelaskan kepentingan politik Walikota dibalik intervensi politik serta mengungkapkan dampak dari intervensi politik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat normatif, deskriptif dan eskplanatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Azhari, dimana Intervensi politik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat politik dalam mempengaruhi proses penempatan dan promosi birokrat pada jabatan-jabatan birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural di lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Padang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena proses rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah dimana Intervensi politik yang dilakukan oleh Pejabat Politik untuk melanggengkan kekuasaannya dan dilakukan secara langsung yang berakibat mempengaruhi hasil keputusan yang telah di tetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum. Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pejabat politik tidak melakukan intervensi yang berdampak negatif bagi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara dan diharapkan agar Komisi Pemilihan Umum lebih memberdayakan pegawainya sendiri dalam menempati jabatan struktural yang ada serta mengembalikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan ke instansi asal, agar Komisi Pemilihan Umum dapat mengelola Sumber Daya Manusiannya sendiri.

Kata kunci :  
Intervensi Politik, Birokrasi dan Komisi Pemilihan Umum

## **ABSTRACT**

*Name : Atika Verina*  
*Study Program : Master of Social and Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences, Andalas University*  
*Title : Analysis of Political Intervention toward Regional Civil Servant Recruitment Employed in Padang City General Elections Commission*

*General Elections Commission is an independent institution and should be free from any other party interventions based on what is mentioned in the law. In term of employment and particular structural positions, General Elections Commission has been still dependent on regional government that has structured impact from political intervention toward General Elections Commission in making policies. Related to that condition, this study tried to describe the process of intervention, mayor political interest behind the political intervention, and to reveal the impact the political intervention. This research was conducted by using qualitative approach. It was a normative, descriptive, and explanative case study. The data were collected from interviews and library study. The theory used in this research was from Azhari who says that political intervention is an effort which is done by politicians to influence the placement process and promotion of bureaucrats on particular positions. The findings of this research showed that the implementation of recruitment in fulfilling the structural position in Padang city General Elections Commission had not fit yet with what is written down on the laws. Its process was intervened by regional political policies to eases the power and was done directly that had impact toward the results of a predetermined decision which have been set by general secretary of General Elections Commission. From the findings, it is suggested that the politicians should not do any intervention that has negative impact on the development of civil servants carrier. It is also expected that General Elections Commission should be more empower its employees in taking responsibility on their structural positions and bring back the regional civil servants to their home institutions so that General Elections Commission can manage its human resources.*

*Keywords:*

*political intervention, bureaucracy, general elections commission*